

**PERAN MOHAMMAD NATSIR DALAM POLITIK
DI INDONESIA TAHUN 1930-1942**

ARTIKEL



Oleh:

ARDHI ISNANTO

NPM. 12144400069

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

ARDHI ISNANTO. *Peran Mohammad Natsir Dalam Politik Di Indonesia Tahun 1930-1942.*

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Mohammad Natsir dan Pemahaman Politik Mohammad Natsir di Indonesia. Disamping itu juga untuk mengetahui Langkah-Langkah strategis yang digunakan Mohammad Natsir Dalam Berpolitik.

Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode literature yang langkah-langkahnya adalah pertama heuristik yaitu mengumpulkan sumber yang memberikan keterangan peristiwa yang diteliti. Kedua kritik sumber, ada dua langkah yang diperlukan yaitu kritik ekstern untuk mendapatkan otentitas dan kritik intern untuk mendapatkan kredibilitas sumber. Ketiga Interpretasi yaitu melakukan penafsiran terhadap fakta. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam hal ini yaitu analisis atau menguraikan dan sintesa yaitu menyatukan dari beberapa fakta yang diperoleh kemudian disatukan dalam rangkaian sejarah yang berdasarkan urutan waktu dan kejadian. Keempat Penyusunan yaitu menyusun data yang diperoleh dari sumber kedalam sebuah karya ilmiah sesuai dengan judul Peranan Mohammad Natsir Dalam Politik Di Indonesia Tahun 1930-1942.

Dalam penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, kabupaten Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Natsir adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Mohammad Natsir turut memberikan arti dan arah perjuangan kemerdekaan Indonesia secara positif bagi bangsa dan negara.

Kata Kunci: Politik Mohammad Natsir.

ABSTRACT

ARDHI ISNANTO. Mohammad Natsir Role in Politics In Indonesia Year 1930-1942.

This research aims to know the background of life Mohammad Natsir and Understanding Politics Mohammad Natsir in Indonesia. In addition, to determine strategic steps used Mohammad Natsir In Politics.

The writing is done by using the method of literature that steps are first heuristic is to collect resources that provides event details are researched. The second source of criticism, there are two necessary steps that external criticism to get the authenticity and internal criticism to gain credibility source. the third interpretation is an interpretation of the facts. there are two things to note, in this case the analysis or outlines and synthesis which brings together from several facts obtained are then joined together in a series of history based on the sequence of time and events. Fourth Preparation is compiling data obtained from sources into a scientific work in accordance with the title role of Mohammad Natsir in Politics In Indonesia Year 1930-1942.

In writing this essay can be concluded that Mohammad Natsir born in Alahan Panjang, Loire Gumanti, Solok regency, West Sumatra, July 17, 1908. Natsir was a scholar, a politician, and Indonesian freedom fighters. He is the founder and leader of the political party Masiumi, and prominent Islamic leaders in Indonesia. Mohammad Natsir helped give meaning and direction of the struggle for Indonesian independence positively to the nation.

Keywords: Politics Mohammad Natsir.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi krisis multidimensi, politik, hukum, sosial budaya, hankam, bahkan moral masyarakat. Sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan. Tampaknya masalah besar tersebut belum dapat diatasi oleh para penyelenggara Negara; termasuk elit politik, baik disuprastruktur maupun infrastruktur yang akibatnya mengganggu stabilitas sosial budaya yang sedang dikembangkan dalam pembangunan nasional.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) semakin berkembang, kepastian hukum semakin tidak jelas, pengangguran, kemiskinan belum diatasi secara optimal. Akibatnya, rakyat bingung dan mempertanyakan tentang kemampuan elit politik dalam menyelesaikan problem bangsa. Selain itu, keadaan ini mengakibatkan frustrasi sosial, yang mengarah kepada kehidupan yang anarkis, konflik sosial, penjarahan, kebebasan tanpa batas, keberingasan yang bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang bangsa Indonesia yang terkenal sopan, lemah lembut, dan penuh toleransi. Silih asah, silih asuh sesama anak bangsa semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.

Di dalam kancah perpolitikan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, semakin merajalela praktik-praktik yang kurang bermoral. Ditengah-tengah kehidupan elit politik terjadi pertarungan kepentingan antar pribadi dan kelompok yang sangat kuat sehingga tidak lagi mengindahkan siapa kawan dan siapa lawan termasuk saudaranya sendiri. Keadaan ini diperparah oleh kasus-kasus yang belakangan ini membawa para politikus elit kejeruji-jeruji penjara satu persatu. Itu semua menandakan kebejatan dan kehinaan moral suatu bangsa.

Tidak ada lagi kesadaran untuk membentuk peradaban secara sehat dan berwibawa. Kini, masyarakat Indonesia mengalami krisis identitas diri. Masyarakat sungguh memerlukan kepemimpinan yang dipegang pribadi-pribadi yang bertanggungjawab, yang memegang amanah berlandaskan pada dasar-dasar keagamaan. Artinya, para elit politik perlu meneladani praktik-praktik politik

profetik dalam menjalankan amanah dari masyarakat, yakni terwujudnya pemerintahan yang merakyat, berdaulat, adil, dan jujur untuk kesejahteraan masyarakat.

Alangkah malangnya bangsa ini karena perilaku elit politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keamanan, dan keberwibawaan. Mereka kebanyakan tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok yang pada prinsipnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Bangsa ini mengalami krisis kejujuran, krisis kesadaran kolektif untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat destruktif yang merugikan kepentingan bersama.

Banyak fenomena yang menunjukkan kemerosotan moral dan elit politik bangsa, mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Ditangan sebagian elit politik, jabatan yang mereka emban menjelma sebagai sarana untuk berlomba-lomba pada jalan kejelekan (*fastabiqul sayyiah*) dan bukan pada kebaikan (*fastabiqul khairat*). Lalu harus berbuat apa bangsa ini ketika moralnya telah merosot dan tak berdaya? Para elit politik seolah lupa bahwa bangsa Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila yang semua sila-silanya bersumber dari nilai-nilai agama. Akibatnya, para elit politik pun tidak terfikir lagi untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut (Ahmad syafi'i Maarif, 1993:72).

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama dikalangan elit politik bisa dikatakan belum optimal. Hal ini tercermin belum optimalnya ajaran agama dijadikan sumber moral dan etika elit politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, agama baru dipahami dan diamalkan dalam ritual semata, sehingga belum menyentuh kesadaran dan kedalaman ajaran agama yang merupakan substansi yang paling *urgenyang* tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, moral dan etika elit politik seharusnya mencerminkan manusia yang percaya dan meyakini kepada

Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengawasi seluruh gerak-gerik kehidupannya di mana pun berada.

Salah satu agama yang mendapat penganut dari kalangan bangsa Indonesia, ialah agama Islam, agama yang mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan, yang dalam bentuk mutakhirnya diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan rakyat seperangkat aturan hukum, betapa pun kuno dan sederhananya, namun dapat mengikuti kemajuan peradaban dunia. Islam memberikan pada negara peraturan hukum yang fleksibel berdasarkan apresiasi yang benar atas hak dan kewajiban manusia. Islam juga mengajarkan persamaan manusia dimata hukum dan menetapkan kontrol atas pemegang kekuasaan hukum dengan kata lain hukum yang didasarkan atas kewajiban agama dan sanksi agama. Kesempurnaan dan efektifitas tiap ketentuan hukum itu, akan membuat yang lainnya bernilai dan jika semuanya digabungkan akan menciptakan suatu politik yang lebih unggul dari sistem politik manapun.

Hidup hanya akan berarti jika dihabiskan untuk da'wah dan jihad. Menurut Mohammad Natsir Islam adalah harga mati yang harus selalu diperjuangkan. Islam bukanlah semata-mata suatu agama dalam definisi yang sempit, tapi merupakan suatu pandangan hidup yang meliputi soal-soal politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Hal ini karena hakikat Islam mengatur segala aspek kehidupan dan berlaku untuk sepanjang zaman. Bahkan pada setiap ibadah yang dilakukan terdapat nilai sosial yang menyertainya. Termasuk dalam hal sistem politik dan pemerintahan, Islam sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama prinsip-prinsip pemikiran dalam Islam tetap bisa dipertahankan. Mohammad Natsir begitu percaya bahwa Islam merupakan sumber perjuangan melawan segala macam bentuk penjajahan, seperti eksploitasi manusia atas manusia, pemberantasan kebodohan, pendewaan, kemelaratan dan kemiskinan (Luth Thohir, 1999:96).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang Kehidupan Mohammad Natsir?
2. Bagaimana Pemikiran Politik Mohammad Natsir di Indonesia?
3. Bagaimana Strategi Politik Mohammad Natsir di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian sejarah, lazim juga disebut dengan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Menurut G. J. Garraghan dalam buku Dudung Abdurahman (2007:53) metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Hal senada juga dikemukakan oleh Louis Gottschalk dalam bukunya Dudung Abdurahman (2007:54) yang menjelaskan bahwa dalam metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sejarah yang dapat dipercaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui suatu penelitian. Menurut Kuntowijoyo (1994:90), topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Data yang sudah dianalisis harus teranalisis dahulu. Dalam hal ini harus kembali kepada motif penelitian yakni bukan semata-mata untuk menghasilkan karya yang bersifat komplikasi. Akan tetapi, haruslah dapat

memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan fakta baru dari penemuan-penemuan dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah didapat.

2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “ *Heurishein* “ yang artinya memperoleh (Dudung Abdurahman, 2007:63) sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku perpustakaan, artikel, internet dan lain-lain.

3. Kritik Sumber

Setelah semua data dalam berbagai kategori terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan uji:

- a. Keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Keabsahan tentang kesahihan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

4. Interpretasi

Interpretasi sering juga disebut dengan analisis data, menurut Kuntowijoyo dalam buku Dudung Abdurahman (2007:73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu: analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan

masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintetiskan agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

5. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Dudung Abdurahman, 2007:76). Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bagian yaitu: pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, diantara masing-masingnya terdapat benang merah yang saling berhubungan.

PEMBAHASAN

Dari uraian tentang pemikiran Politik Mohammad Natsir, tampak bahwa pemikiran Mohammad Natsir dengan cirri khas religiusitasnya akan tetapi tidak kalah dengan pemikiran intelektual sekular. Hal itu disebabkan karena Mohammad Natsir secara informal melakukan dialog edukatif yang intensif tentang masalah-masalah agama, dan selain itu, ia juga belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, yang tentunya syarat dengan gagasan modern tentang negara, seperti demokrasi, nasionalisme, republik. Keberhasilan Mohammad Natsir dari satu sisi adalah berhasil merekonsiliasikan pemikiran modern dengan pesan-pesan nash al-Quran maupun hadits. Selain itu, dari waktu ke waktu, ia memiliki karakteristik, kecenderungan dan visi tersendiri, disesuaikan dengan setting sosiopolitik yang ada sehingga munculnya pemikiran Mohammad Natsir merupakan respon atau jawaban terhadap perolema yang muncul.

Hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Mohammad Natsir adalah hubungan yang integral dan simbiotik, tidak ada dikotomik yang bermuara kepada sekularisasi. Baginya, agama Islam adalah agama universal yang menata seluruh mekanisme kehidupan, termasuk masalah negara.

Sementara mengenai sistem pemerintahan menurut Mohammad Natsir, bahwa di dalam Islam tidak ada uraian yang spesifik mengenai mekanismenya, yang ada hanya prinsip-prinsip saja. Oleh karenanya, sebagai produk ijtihad politiknya, ia mengusulkan sistem pemerintahan parlementer.

Tentang kepala negara, menurut Mohammad Natsir tidak ada penyebutan yang spesifik, dan tidak harus terpaku pada istilah Islam klasik, yaitu khalifah. Baginya kepala Negara bisa khalifah, Amirulmu'minin, atau presiden. Yang paling penting, seorang khalifah, karena negara Indonesia mayoritas Islam, maka negaranya harus Islam. Dan mengenai aparaturnya, tidak mesti Islam,

tetapi memberi peluang kepada agama lain untuk menduduki jabatan strategis lainnya.

Mengenai kedaulatan negara, Mohammad Natsir mengungkapkan istilah teodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan. Mengenai dasar negara, sebelum sidang konstituante Mohammad Natsir sangat gigih membela Pancasila. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil kristalisasi yang disebutnya lima ciri kebijakan hasil musyawarah antara pemimpin-pemimpin bangsa, dan tidak bertentangan dengan al-Quran. Namun ketika sidang konstituante dan pasca itu, Mohammad Natsir sangat gigih menggelorakan semangat dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Hal ini cukup beralasan, karena selain ia memiliki latar belakang pendidikan informal keagamaan kepada A. Hasan yang terkenal memiliki pemikiran Islam radikal, juga Mohammad Natsir menyuarakan partai Islam, yaitu mewakili Masyumi. Ia menyatakan bahwa Pancasila secular dan netral. Implikasi pemikiran Mohammad Natsir yang memiliki kecenderungan politik identic dan kritis terhadap roda pemerintahan yang kurang mengindahkan demokrasi, sehingga ia tersingkir dari pentas politik, hingga karir politiknya berakhir di penjara menjadi tahanan politik serta dibubarkannya partai Masyumi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai Peran Mohammad Natsir Dalam Politik Di Indonesia Tahun 1930-1942, maka dapat diambil kesimpulan baik dari segi historis maupun dari segi pedagogis sebagai berikut:

A. Kesimpulan Historis

Dari uraian tentang pemikiran Politik Mohammad Natsir, tampak bahwa pemikiran Mohammad Natsir dengan ciri khas religiusitasnya akan tetapi tidak kalah dengan pemikiran intelektual sekular. Hal itu disebabkan karena Mohammad Natsir secara informal melakukan dialog edukatif yang intensif tentang masalah-masalah agama, dan selain itu, ia juga belajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, yang tentunya syarat dengan gagasan modern tentang negara, seperti demokrasi, nasionalisme, republik. Keberhasilan Mohammad Natsir dari satu sisi adalah berhasil merekonsiliasikan pemikiran modern dengan pesan-pesan nash al-Quran maupun hadits. Selain itu, dari waktu ke waktu, ia memiliki karakteristik, kecenderungan dan visi tersendiri, disesuaikan dengan setting sosiopolitik yang ada sehingga munculnya pemikiran Mohammad Natsir merupakan respon atau jawaban terhadap perolema yang muncul.

Hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Mohammad Natsir adalah hubungan yang integral dan simbiotik, tidak ada dikotomik yang bermuara kepada sekularisasi. Baginya, agama Islam adalah agama universal yang menata seluruh mekanisme kehidupan, termasuk masalah negara.

Sementara mengenai sistem pemerintahan menurut Mohammad Natsir, bahwa di dalam Islam tidak ada uraian yang spesifik mengenai mekanismenya, yang ada hanya prinsip-prinsip saja. Oleh karenanya, sebagai produk ijtihad politiknya, ia mengusulkan sistem pemerintahan parlementer.

Tentang kepala negara, menurut Mohammad Natsir tidak ada penyebutan yang spesifik, dan tidak harus terpaku pada istilah Islam klasik, yaitu khalifah.

Baginya kepala Negara bisa khalifah, Amirulmu'minin, atau presiden. Yang paling penting, seorang khalifah, karena negara Indonesia mayoritas Islam, maka negaranya harus Islam. Dan mengenai aparaturnya, tidak mesti Islam, tetapi memberi peluang kepada agama lain untuk menduduki jabatan strategis lainnya.

Mengenai kedaulatan negara, Mohammad Natsir mengungkapkan istilah teodemokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan. Mengenai dasar negara, sebelum sidang konstituante Mohammad Natsir sangat gigih membela Pancasila. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil kristalisasi yang disebutnya lima ciri kebijakan hasil musyawarah antara pemimpin-pemimpin bangsa, dan tidak bertentangan dengan al-Quran. Namun ketika sidang konstituante dan pasca itu, Mohammad Natsir sangat gigih menggelorakan semangat dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Hal ini cukup beralasan, karena selain ia memiliki latar belakang pendidikan informal keagamaan kepada A. Hasan yang terkenal memiliki pemikiran Islam radikal, juga Mohammad Natsir menyuarakan partai Islam, yaitu mewakili Masyumi. Ia menyatakan bahwa Pancasila secular dan netral. Implikasi pemikiran Mohammad Natsir yang memiliki kecenderungan politik identic dan kritis terhadap roda pemerintahan yang kurang mengindahkan demokrasi, sehingga ia tersingkir dari pentas politik, hingga karir politiknya berakhir di penjara menjadi tahanan politik serta dibubarkannya partai Masyumi.

B. Kesimpulan Pedagogis

Sejarah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, peristiwa masa lampau tentunya mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Dari peristiwa tersebut akan berpengaruh terhadap peristiwa sekarang dan yang akan datang. Belajar sejarah bukan hanya dimaksudkan untuk

mengetahui kejadian masa lampau saja, namun yang paling dekat adalah dapat mengambil segi positifnya dari peristiwa masa lampau tersebut. Dalam mempelajari pembahasan tentang Peran Mohammad Natsir Dalam Politik Di Indonesia Tahun 1930-1942, maka penulis dapat mengambil manfaat yang bersifat kependidikan bagi generasi bangsa Indonesia.

Sebagai seorang pendidik harus pemikiran Mohammad Natsir perlu dikembangkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya mengenai pemikirannya tentang demokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan. Dalam konteks kekinian, menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam adalah suatu hal yang tidak mungkin sebagaimana yang dicita-citakan oleh Natsir, akan tetapi menyemangati semua konsep dan perilaku para penyelenggara Negara dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits adalah sesuatu hal pula yang mungkin dapat dipraktikkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anwar, Harjono. 1996. *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Perilaku dan Peristiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Harjono, Anwar. 1996. *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Maarif, Syafi'i Ahmad. 1993. *Peta Bumi Intelektual Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Natsir, Hamka. 2001. *Pahlawan Nasional dalam Membincangkan Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Natsir, Mohammad. 1976. *World Of Islam Festival dalam perspektif sejarah*, Jakarta: Yayasan Idayu.
- Natsir, Muhammad. 2004. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy.
- Purwanto, Setiadi. 2012. *Douwes Dekker; Sang Inspirator Revolusi*. Jakarta: Gramedia.
- Shahab, Idrus F. 2008. *Natsir; Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: Gramedia)
- Thohir, Luth. 1999. *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani
- Yanto, Bashari. 2005. *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh.

BIODATA PENULIS

Nama : ARDHI ISNANTO
NPM : 12144400069
Tempat, tanggal lahir : BANTUL, 27 DESEMBER 1993
Alamat : KINTELAN, SUMBERMULYO,
BAMBANGLIPURO, BANTUL

Riwayat Pendidikan:

TK BONDALEM

SD N 1 BONDALEM

SMP N 3 BANTUL

SMK MUH 1 BAMBANGLIPURO

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA